

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN LAPTOP GRATIS UNTUK MENINGKATKAN PEMBELAJARAN DIGITAL TINGKAT SEKOLAH DASAR NEGERI DI KELURAHAN MADIUN LOR, KOTA MADIUN

Nabila Haninda Mufidah

Program Studi S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
nabila.21150@mhs.unesa.ac.id

Tauran

Program Studi S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
tauran@unesa.ac.id

Abstrak

Kebijakan bantuan laptop gratis di tingkat SD Negeri di Kota Madiun merupakan suatu langkah yang dilakukan pemerintah guna memajukan kualitas sumber daya yang dimiliki dengan memanfaatkan digitalisasi dan berupaya untuk memperkenalkan digitalisasi sejak di bangku SD. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan bantuan laptop gratis untuk meningkatkan pembelajaran digital tingkat SD Negeri di Kelurahan Madiun Lor, Kota Madiun. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deksriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian ini pada enam aspek dari model implementasi Van Meter dan Van Horn yaitu standar dan tujuan kebijakan; sumber daya; karakteristik badan pelaksana; komunikasi dan aktivitas pelaksana; kondisi sosial, ekonomi, dan politik; serta disposisi pelaksana. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi; wawancara dengan informan yang menggunakan metode *purposive sampling*; serta dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model analisis dari Miles dan Huberman yaitu dengan reduksi data; penyajian data; dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya lima aspek yang terpenuhi dengan baik mulai dari standar dan tujuan kebijakan, karakteristik badan pelaksana, komunikasi dan aktivitas pelaksana, kondisi ekonomi, sosial, politik, serta disposisi pelaksana. Satu aspek yang belum sepenuhnya terpenuhi yaitu aspek sumber daya, dimana ditemukan laporan laptop rusak, jaringan *wifi* tidak stabil, dan guru yang belum memahami teknologi. Peneliti memberikan saran agar digitalisasi belajar bisa terlaksana dengan baik harus mulai memperhatikan dari aspek sumber daya manusia, pengawasan, hingga fasilitas penunjang yang baik secara menyeluruh di penjuru kota Madiun.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Bantuan Laptop Gratis

Abstract

The free laptop support policy at the State SD level in Madiun City is a step taken by the government to advance quality of resources it has by using digitization and striving to introduce digitization since at the SD bench. The aim of this research is to find out the implementation of the free laptop assistance policy to improve digital learning at the State SD level in Kelurahan Madiun Lor, Madiun City. This research uses descriptive research methods with a qualitative approach. The research focuses on six aspects of the Van Meter and Van Horn implementation model: policy standards and objectives; resources; characteristics of implementing bodies; communications and implementing activities; social, economic, and political conditions; and enforcement dispositions. Data collection techniques are observational; interviews with informants using purposive sampling; and documentation. Data analysis techniques use the analytical model of Miles and Huberman, namely with data reduction; data presentation; and conclusion withdrawal. The results of the research show that only five aspects are well met ranging from standards and policy objectives, characteristics of implementing bodies, communications and enforcement activities, economic, social, political conditions, and implementing disposition. One aspect that has not been fully fulfilled is the resource aspect, where it was found to report corrupted laptops, unstable wifi networks, and teachers who have not yet understood technology. Researchers suggest that if learning digitization is to be implemented well, attention should start from human resource aspects, surveillance, to good support facilities thoroughly in the corner of the city of Madiun.

Keywords: Implementation, Policy, Free Laptop Help

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu bagian terpenting bagi setiap negara. Menurut pendapat Luthfi, Restiyani P & Richi R. (2021) menjelaskan bahwa manusia membutuhkan pendidikan dalam kehidupan, seperti halnya dengan sandang dan pangan. Dengan adanya pendidikan maka dapat mencetak generasi penerus bangsa yang handal di berbagai bidang sehingga negara tersebut memiliki sumber daya manusia yang bisa bersaing dengan negara lainnya.

Fokus utama untuk menyediakan pendidikan di Indonesia yaitu dengan memperhatikan mutu di bidang pendidikan, hal tersebut dapat dilakukan dengan meningkatkan fasilitas yang memadai. (Barnawi dalam Andri Jaya, 2022) mengatakan bahwa pendidikan dan sarana prasarana memiliki suatu ikatan yang penting dimana sarana prasarana yang lengkap adalah salah satu kebutuhan yang harus dimiliki guna mendukung kegiatan pendidikan yang optimal.

Dalam menyediakan hal tersebut diperlukan adanya peran dari pemerintah seperti yang diatur dalam Undang-Undang No 23 Thn 2014 tentang Pemerintah Daerah. Disebutkan jika pendidikan merupakan urusan yang konkuen, yaitu urusan pemerintahannya dipisahkan menjadi milik pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Serta disini pemerintah daerah wajib untuk menyelesaikan permasalahan mengenai pendidikan yang ada di daerahnya sendiri mulai dari tingkat PAUD; pendidikan nonformal hingga jenjang sekolah menengah. Dengan adanya peraturan tersebut maka suatu daerah perlu untuk menyediakan pelayanan yang mendukung seperti melakukan pembaharuan serta inovasi guna menyiapkan diri dalam era *society* 5.0 yang bisa dimanfaatkan untuk media pembelajaran semua pihak. Suatu inovasi tersebut dapat diterima jika para pembuat kebijakan dapat mengidentifikasi apa saja keperluan yang dibutuhkan dalam proses pelaksanaannya (Eprilianto, dkk, 2019:32).

Pembelajaran yang dimaksud adalah dengan literasi digital. Pengertian dari literasi digital itu sendiri adalah kemampuan dalam menggunakan informasi dari berbagai jenis sumber yang sangat luas dan bisa dicari dengan menggunakan perangkat komputer (Gilster dalam Munir, 2017). Fasilitas yang dapat mendukung dalam kegiatan tersebut agar dapat terwujud yakni dengan memberikan bantuan berupa laptop gratis berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dalam Peraturan Daerah No 17 Tahun 2019. Pada peraturan tersebut terdapat misi pembangunan yang

bernama “PANCA KARYA”, dimana dalam misi tersebut memiliki 5 karya dan dalam karya pertamanya menjelaskan mengenai Madiun Kota Pintar. Pada misi tersebut menginginkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Madiun dengan memberikan peningkatan kualitas sekolah pada semua jenjang pendidikan.

Pemberian laptop gratis ini dilakukan oleh Pemerintah Kota Madiun secara bertahap sejak tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1 Rincian Pemberian Bantuan Laptop Gratis di Kota Madiun

Tahun	SD Negeri	SMP Negeri
2020	2.100 Unit	3.325 Unit
2023	3.892 Unit	5.508 Unit

Sumber: Data Dinas Pendidikan Kota Madiun, 2023

Total laptop yang sudah diberikan adalah 14.825 Unit. Bantuan ini akan diberikan kepada siswa SD di kelas 4, kelas 5 dan kelas 6 serta guru kelas masing-masing, sedangkan pada tingkat SMP diberikan kepada siswa kelas 7, kelas 8 dan kelas 9 serta guru mata pelajaran. Laptop ini akan diberikan kepada peserta didik secara gratis tanpa memandang status atau kondisi sosial peserta didik. Laptop yang diberikan dengan sistem pinjam pakai, Dimana laptop yang sudah diberikan kepada peserta didik harus dikembalikan kembali setelah lulus dan akan mendapatkan kembali bantuan tersebut setelah siswa tersebut masuk ke jenjang berikutnya sesuai dengan sekolah yang bersangkutan sesuai dengan perjanjian yang ada dalam Perwali No 33 Thn 2020 mengenai Petunjuk Teknis Penggunaan Laptop Untuk Dioperasikan Oleh Siswa Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Madiun.

Salah satu wilayah yang memperoleh distribusi bantuan tersebut adalah sekolah yang berada di Kelurahan Madiun Lor. Pada kelurahan tersebut memiliki sekolah SD sebanyak 5 sekolah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1 Data Sekolah Kelurahan Madiun Lor pada Januari 2023

Nama Sekolah	Ruang Kelas	Total Peserta Didik
SDN 01 Madiun Lor	6	89
SDN 02 Madiun Lor	6	93

SDN 03 Madiun Lor	18	510
SDN 04 Madiun Lor	12	309
SDN 05 Madiun Lor	17	506

Sumber: Olahan Peneliti, 2023

Berdasarkan tabel diatas maka jumlah keseluruhan peserta didik yang bersekolah di Kelurahan Madiun Lor memiliki total 4.604 peserta didik. Kondisi sekolahan yang berada pada wilayah Madiun Lor rata-rata merupakan sekolah negeri favorit masyarakat Kota Madiun dikarenakan sekolahan tersebut sering memperoleh prestasi, kondisi bangunan sekolah yang baik dan memiliki fasilitas yang baik serta letak sekolahan yang berada di pusat kota sehingga memiliki akses yang mudah untuk dijangkau. Bahkan hingga saat ini pemerintah juga menyediakan *wifi* gratis yang tersebar di 2.365 titik di seluruh Kota Madiun. Tetapi sayangnya masih ditemukan kendala dalam proses implementasi ini seperti adanya laporan laptop yang rusak; kurangnya kontrol pada siswa saat menggunakan laptop; koneksi internet yang kurang stabil; serta kurangnya sumber daya manusia yang mumpuni dalam mengoperasikan laptop.

Berdasarkan penjabaran permasalahan diatas, dapat dikatakan bahwa pemerintah ingin melakukan peningkatan sumber daya sekaligus melakukan pemerataan akses pendidikan dengan memberikan bantuan kepada seluruh pelajar SD, SMP Negeri tanpa terkecuali. Maka karena itu penulis tertarik untuk meneliti mengenai “Implementasi Kebijakan Bantuan Laptop Gratis Untuk Meningkatkan Pembelajaran Digital Tingkat Sekolah Dasar Negeri di Kelurahan Madiun Lor Kota Madiun”.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan memakai jenis deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif menurut (Sutopo dan Arief dalam Pahleviannur dkk, 2022) adalah cara yang digunakan untuk menggambarkan serta mencari tahu mengenai peristiwa atau fakta di lapangan; persepsi; pola pikir kelompok maupun individu; sikap dan lain sebagainya dengan tujuan bisa menjelaskan; menggambarkan serta mengungkapkan mengenai penelitian yang sedang dilakukan. Sedangkan penelitian deskriptif merupakan pengkajian yang digunakan untuk mencari fakta, fenomena, gejala atau kejadian yang muncul secara sistematis dan akurat. Fokus

penelitian ini menggunakan terori dari Van Meter dan Van Horn (dalam Kasmad Rulinawati, 2013) yang didalamnya terdapat 6 indikator yaitu: Standar dan tujuan kebijakan; Sumber daya; Karakteristik badan pelaksana; Kondisi sosial, ekonomi, dan poliik; serta Disposisi implementor/pelaksana.

Sumber data yang dipakai meliputi sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer berasal dari wawancara yang dilakukan dengan kepala dinas pendidikan Kota Madiun, *staff* dinas pendidikan Kota Madiun, kepala sekolah SDN 03 dan 04 Madiun Lor, Guru di SDN 03 Madiun Lor, peserta didik kelas VI SDN 05 Madiun Lor, dan orang tua siswa yang mendapatkan bantuan. Data sekunder diperoleh dari hasil rekap, dokumentasi, buku, jurnal maupun media informasi yang dapat dipertanggung jawabkan.

Teknik pengumpulan data ini menggunakan cara wawancara dengan narasumber yang dipilih berdasarkan pemahaman mengenai kebijakan; Observasi dengan melihat lembaga pelaksanaan, komunkas organisasi maupun penerima bantuan, serta melihat sumber daya yang tersedia; dan terakhir dengan menggunakan dokumentasi berupa regulasi program bantuan laptop gratis. Teknik analisis menggunakan metode dari Miles dan Huberman (dalam Hardani, 2020) yaitu reduksi data; penyajian data; dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan bantuan laptop ini merupakan tindak lanjut dari adanya rencana pembangunan daerah agar mampu menyediakan SDM unggul bagi penerus bangsa menuju generasi emas di tahun 2045. Oleh karena itu dibuatlah regulasi khusus mengenai kebijakan tersebut yang diatur dalam Peraturan Walikota Madiun No 33 Thn 2020 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Laptop Untuk Dioperasikan Oleh Siswa Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Madiun. Dimana dalam peraturan tersebut menjelaskan secara lengkap mengenai SOP untuk orang tua dan pihak sekolah serta Dinas Pendidikan mengenai bantuan laptop tersebut.

Pemberian bantuan ini memiliki 2 tahap. Yang pertama yaitu di tahun 2020 memberikan laptop dengan spesifikasi dari *windows*. Disini pihak pemerintah menemukan suatu celah yaitu laptop yang dibagikan tersebut digunakan untuk kegiatan yang ada di luar pembelajaran digital seperti bermain game. Oleh karena itu Dinas Pendidikan melakukan evaluasi dengan mengganti jenis laptop ke *chromebook*. Hal ini dilakukan untuk menekankan aspek kontrol dan pengawasan, karena

Chromebook sendiri terintegrasi dan diatur oleh Kementerian sehingga laptop ini tidak bisa digunakan untuk bermain game. Dengan begitu maka fasilitas laptop ini bisa dimanfaatkan dan digunakan seperti yang diharapkan.

Berikut adalah rincian penerimaan bantuan laptop pada tahun 2023 di SD Negeri 03, 04, dan 05 Madiun Lor yang telah didistribusikan kepada peserta didik.

Tabel 3 Penerimaan Laptop Tahun 2023

No	Nama Sekolah	Siswa		Guru		Total
		Kls 4	Kls 5	Kls 4	Kls 5	
1	SDN 03 Madiun Lor	82	89	3	3	177
2	SDN 04 Madiun Lor	48	50	2	2	102
3	SDN 05 Madiun Lor	87	92	3	3	185

Sumber: Olahan Peneliti, 2023

Dengan demikian maka laptop yang sudah di distribusikan kepada peserta didik di Kelurahan Madiun Lor selama 2023 adalah sebanyak 464. Laptop yang diberikan oleh sekolah tersebut nantinya akan digunakan hingga peserta didik tersebut dinyatakan lulus pada tingkatan tersebut. Misalnya peserta didik tersebut memperoleh bantuan saat di kelas 4 SD maka laptop tersebut akan digunakan hingga kelas 6 SD, kemudian setelah peserta didik tersebut dinyatakan lulus maka laptop tersebut harus dikembalikan kepada pihak sekolah dan saat peserta didik tersebut melanjutkan sekolah ke jenjang SMP maka ia akan memperoleh kembali bantuan laptop sesuai dengan sekolah SMP yang didaftarkan selagi sekolah tersebut merupakan sekolah negeri di Kota Madiun.

Terdapat 6 indikator dalam mengukur implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Kasmad Rulinawati, 2013) yaitu:

a) Standar dan Tujuan Kebijakan

Suatu kebijakan yang telah dirancang serta diimplementasikan pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai. Dengan menetapkan sebuah tujuan yang ada di suatu kebijakan tersebut nantinya dapat dijadikan sebagai bahan untuk mengukur pencapaian dan mengukur tingkat keberhasilan dalam melaksanakan kebijakan tersebut.

Adapun tujuan dari kebijakan bantuan laptop gratis yang diberikan kepada peserta didik SD Negeri kelas 4,5,6 serta guru kelas ini sesuai dengan standar di Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Laptop Untuk Dioperasikan Oleh Siswa SD Negeri dan SMP Negeri di Kota Madiun. Alasan bantuan ini diberikan kepada siswa SD menurut Ibu Dr. Hj. Lismawati, M.Pd., selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun menjelaskan bahwa:

“Bantuan laptop untuk siswa SD supaya sejak dini bisa mendapatkan wawasan yang luas, sehingga dengan adanya teknologi bisa merangsang siswa tersebut untuk mencari pengetahuan yang lebih luas, maka dari itu dengan adanya teknologi yang bisa digenggam oleh siswa sejak dini maka dunia ini bisa kita kuasai” (Wawancara tanggal 21 Maret 2023)



Gambar 1 Pelaksanaan kegiatan pembelajaran menggunakan laptop

Sumber: Data Sekunder, 2023

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa pentingnya pengenalan digitalisasi saat di bangku sekolah dasar. Hal ini dilakukan agar mampu menciptakan kondisi *student well-being*, yang artinya siswa dapat belajar dalam situasi yang nyaman, bahagia, dan sejahtera. Maka dengan begitulah pembelajaran dapat menjadi lebih optimal.

Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa Kota Madiun memiliki standar dan tujuan kebijakan yang jelas sehingga saat implementasi berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diinginkan. Dimana standar pembagian laptop tersebut diberikan kepada siswa sekolah dasar kelas 4,5,6, dan guru kelas. Serta memiliki tujuan yang jelas yaitu untuk meningkatkan mutu pelajar agar menjadi melek teknologi sejak muda.

b) Sumber Daya

Sumber daya merupakan kedudukan penting dalam implementasi untuk melakukan sebuah kebijakan diharuskan melihat ketersediaan sumber daya dalam suatu daerah agar kebijakan tersebut bisa berjalan dengan baik. (Meilisa Dwi & Megawati, S, 2023). Sumber daya sendiri dapat dilihat menjadi 3 kategori yaitu sumber daya manusia; keuangan; maupun sarana dan prasarana.

Jika sumber daya yang telah dimiliki tersebut memadai maka kebijakan tersebut akan berjalan dengan lancar, tetapi sebaliknya jika dalam sumber daya tersebut belum memadai maka kebijakan tersebut akan berjalan lebih sulit dari yang diharapkan.

1. Sumber Daya Manusia (Staff)

Salah satu sumber daya yang memiliki pengaruh cukup besar adalah berasal dari adanya ketersediaan sumber daya manusia yang mencukupi. Hal ini disebabkan karena manusia merupakan pelaku utama dalam proses implementasi. Menyadari akan hal tersebut membuat dinas menyediakan pelatihan seperti yang disampaikan Ibu Dr. Hj. Lismawati, M.Pd., selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun.

“Kita disini akan mengadakan pelatihan digital khususnya dalam penggunaan *chromebook* karena kan kalau *chromebook* ini masih dikatakan asing daripada laptop biasanya jadi perlu diadakan pelatihan. Nanti pelatihannya ada beberapa tahap yang dilakukan bergantian.”

(Wawancara tanggal 26 Mei 2023)

Pelatihan tersebut wajib untuk diikuti oleh guru yang bersangkutan, serta untuk melakukan ini dibutuhkan kerjasama dengan pihak lain yaitu PT Refo Indonesia sebagai mitra resmi dari *Google partner for Education Indonesia*. Sayangnya dalam menerapkan implementasi ini masih ditemukan kendala. Hal ini diungkapkan Ibu Sulistyani, S.Pd, selaku Guru SDN 03 Madiun Lor bahwa:

“Adanya pelatihan jadi bagus jadi lebih mengerti, tetapi ya karena belum terbiasa jadi terkadang masih

bingung, sering lupa, intinya masih harus belajar lagi.”

(Wawancara tanggal 29 Mei 2023)

Dalam hal ini, Ibu Kustiani Tutik Subandiyah, S.Pd.SD, selaku Kepala Sekolah SDN 04 Madiun Lor menambahkan bahwa:

“Kendalanya disini guru-guru sulit memahami tentang *chromebook*, jadi harus saling tolong menolong agar pembelajarannya bisa berjalan”

(Wawancara tanggal 30 Mei 2023)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa masih ditemukan kendala dalam proses pelaksanaannya, meskipun disini pihak penyelenggara memberikan solusi berupa pelatihan tetapi kenyataannya masih ada yang belum mengerti dikarenakan faktor usia dan lain sebagainya.

2. Sumber Daya Keuangan

Sumber daya keuangan disini juga memiliki pengaruh dalam proses implementasi. Dalam sebuah implementasi dibutuhkan dorongan dari sumber daya keuangan yang digunakan sebagai bahan penyediaan operasional, jika dana yang dimiliki cukup maka setiap operasional yang dibutuhkan bisa diimplementasikan lebih mudah

Berkaitan dengan pendanaan kebijakan laptop gratis tersebut diungkapkan oleh Ibu Dr. Hj. Lismawati, M.Pd., selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun bahwa:

“Bantuan laptop gratis ini didanai oleh Pemerintah Kota Madiun sendiri yaitu menggunakan dana APBD. Untuk anggaran laptop sendiri di tahun 2023 mencapai 53 miliar”

(Wawancara tanggal 21 Maret 2023)

Dalam penyediaan sumber daya keuangan ini peneliti dapat melihat bahwa pada implementasi kebijakan bantuan laptop gratis untuk siswa SD dan SMP Negeri di Kota Madiun ini untuk pembelian laptop tersebut menggunakan dana dari APBD Kota Madiun,

yang artinya laptop ini merupakan aset milik daerah yang dikelola oleh Dinas Pendidikan Kota Madiun seperti tercantum dalam perwali Madiun No 33 Thn 2020 pada pasal 3 ayat 1. Dengan demikian Pemerintah Kota Madiun menanggung pembelian laptop sebanyak 14.825 unit. Seluruh laptop yang akan didistribusikan kepada siswa ini memiliki harga sebesar Rp 5.150.000 Juta, dan untuk pengadaan laptop di tahun 2023 ini berarti pemerintah Kota Madiun sudah mengeluarkan anggaran sebesar 57 Miliar Rupiah.

Maka dapat disimpulkan bahwa dalam menjalankan kebijakan tersebut pemerintah Kota Madiun memiliki perencanaan dalam pendanaan yang baik, jika dalam perencanaannya tidak dihitung dengan matang maka akan sulit bagi pemerintah untuk menanggung seluruh pembelian laptop sebanyak 14.825 unit.

3. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Aspek berikutnya yang juga mempengaruhi proses implementasi yaitu sarana dan prasarana yang mendukung selama proses implementasi, hal ini disebabkan sarana prasarana dibutuhkan untuk menyediakan sarana operasional yang dibutuhkan dalam implementasi kebijakan

Dalam mendukung implementasi kebijakan tersebut Pemerintah Kota Madiun dan Dinas Pendidikan Kota Madiun telah menyiapkan fasilitas pendukung guna menciptakan kegiatan pembelajaran yang inovatif. Fasilitas yang disiapkan Dinas Pendidikan untuk mendukung digitalisasi ini disampaikan oleh Ibu Dr. Hj. Lismawati, M.Pd., selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun menyampaikan bahwa:

“Kami juga menyediakan fasilitas pendukung seperti *wifi* yang di 2000 titik yang tersebar di seluruh Kota Madiun termasuk pasar, poskamling, ruang terbuka, tempat wisata, dll. Selain itu kami menyiapkan ruang terbuka yang ramah untuk siswa agar bisa digunakan untuk belajar, diruang

terbuka tersebut kita juga menyiapkan tempat duduk atau meja agar mereka lebih nyaman. Dan jika mereka ingin belajar diluar tetapi jarak antara sekolah dan lokasi tersebut lumayan jauh untuk ditempuh jalan kaki maka disini kita juga siapkan bus sekolah yang siap mengantarkan sesuai lokasi tujuan.”
(Wawancara tanggal 21 Maret 2023)



Gambar 2 Penyerahan laptop kepada siswa SD

Sumber: Data Sekunder, 2023

Selain memberikan bantuan berupa laptop gratis pemkot juga memberikan fasilitas lain guna mendukung kegiatan tersebut seperti menyediakan *wifi* gratis diruang terbuka sebanyak 2.375 titik dan beberapa titik lainnya didalam wilayah sekolah; memberikan ruang terbuka yang ramah untuk digunakan dalam *outdoor learning*.

Dapat dilihat bahwa pihak pemerintah dan dinas berusaha semaksimal mungkin untuk menyediakan pelayanan yang baik, tetapi pada kenyataannya masih ditemukan masalah seperti yang diungkapkan Aulia, selaku siswi kelas VI SDN 05 Madiun Lor bahwa:

“Senang bisa belajar diluar kelas karena bisa jalan-jalan, makan-makan tapi kadang *wifi* nya lemot jadi harus ekstra sabar kalau mau buka aplikasi belajar, tapi ya kadang lancar juga jadi nggak tentu”
(Wawancara tanggal 27 Maret 2023)

Kendala lain juga diungkapkan oleh Ibu Elly Herawati Indriastuti selaku pegawai Dinas Pendidikan Kota Madiun mengatakan bahwa:

“Banyak laporan tentang kerusakan laptop yang disebabkan pemakaian pribadi maupun karena sistem.”

(Wawancara tanggal 21 Maret 2023)

Dapat disimpulkan bahwa pada indikator ini masih ditemui adanya permasalahan dalam implementasi, meskipun dari pihak pemerintah sudah berusaha menyediakan fasilitas yang lengkap sebagai penunjang kebijakan.

c) Karakteristik Badan Pelaksana

Karakteristik badan pelaksana merupakan karakter yang dimiliki oleh badan pelaksana yang menjalankan implementasi kebijakan bantuan laptop gratis. Kriteria tersebut dipilih berdasarkan Dinas Pendidikan Kota Madiun yaitu selaku pengelola dan pengawas dalam kebijakan ini. Untuk pihak yang bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kota Madiun ini memiliki karakter yang berbeda serta disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki.

Berkenaan dengan hal tersebut disini Ibu Dr. Hj. Lismawati, M.Pd., selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun menyampaikan bahwa berbagai pihak yang terlibat dalam kerjasama ini. Berikut adalah pernyataan yang diberikan:

“Kita disini menggandeng UNESA karna seperti yang kita ketahui UNESA merupakan salah satu kampus baik. Ya disitu kita bertukar pikiran tentang pendidikan, cara meningkatkan pendidikan, digitalisasi, dan pastinya bertukar pikiran mengenai kebijakan tersebut. Kemudian kita kerjasama sama PNM buat pengecekan laptopnya dan aktivasi akun belajar. Kemudian disini kita pilih PT Acer Indonesia karena mereka sanggup untuk memenuhi kebutuhan laptop sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan bisa kasih garansi jika ada kerusakan. Setelah itu kita memilih PT Refo untuk memberikan pelatihan kepada guru ya karena *chromebook* ini kan pakai sistem operasi dari *chromeOs* jadi ya biar gampang aja.”

(Wawancara tanggal 21 Maret 2023)

Berdasarkan pernyataan diatas Kota Madiun bekerjasama dengan 4 lembaga dari berbagai arah, selain itu dinas juga bekerjasama dengan sekolah yang

diberikan bantuan dalam hal mengkoordinasikan laptop tersebut selama digunakan pembelajaran; kemudian juga tidak lupa bekerjasama dengan orang tua dan peserta didik untuk berkomitmen menjaga, merawat serta menggunakan laptop sesuai dengan Peraturan Walikota Madiun No 33 Tahun 2020. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Madiun mampu untuk melakukan kolaborasi sejak awal adanya kebijakan hingga saat melaksanakan implementasi dan untuk pemilihan rekanan ini berdasarkan kompetensi dan kemampuan yang dikuasai para pihak.

d) Komunikasi Antar Organisasi

Dalam implementasi suatu kebijakan selalu melibatkan berbagai pihak agar kebijakan tersebut bisa terwujud. Dalam melaksanakan kebijakan ini dapat berjalan dengan baik jika pihak yang berpartisipasi dapat memahami serta mengetahui apa yang sedang dikerjakan sesuai dengan tugas yang dimiliki. Dalam hal ini dibutuhkan pengetahuan serta pemahaman para pelaksana kebijakan ini bisa berjalan apabila memiliki komunikasi yang baik antar pelaksana.

Pada awal perencanaan kebijakan ini dimulai dengan berkonsultasi maupun *sharing* dengan pihak UNESA mengenai kebijakan; pengaplikasian; hingga spesifikasi laptop yang akan digunakan. Kemudian setelah berhasil mendapatkan laptop sesuai anggaran dan spesifikasi yang diinginkan maka disini Dinas Pendidikan melakukan komunikasi dengan menemui beberapa petinggi dari PNM (Politeknik Negeri Madiun) untuk membantu dalam pengecekan barang serta membantu dalam aktivasi aplikasi serta akun belajar.id. Setelah itu barulah Dinas Pendidikan akan mencari penyedia laptop yang bisa memberikan jumlah laptop sebanyak yang diinginkan dengan waktu yang sudah ditentukan serta tidak memiliki laptop yang memiliki spesifikasi seperti yang diinginkan.

Pada tahap pelaksanaannya juga membutuhkan koordinasi yang baik antar staff di lingkungan Dinas Pendidikan dan pihak internal pemerintah. Menurut Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Laptop Untuk Dioperasikan Oleh Siswa SD Negeri dan SMP Negeri di Kota Madiun koordinasi tersebut dilakukan mulai dari internal daerah dan kepala sekolah, dimana sejak awal perencanaan dilakukan koordinasi mulai dari pencetusan gagasan kebijakan hingga pelaksanaan kepada kepala sekolah untuk berkomunikasi langsung

dengan siswa dan orang tua. Hal ini dilakukan agar saat laptop ini didistribusikan kepada siswa tidak terjadi kesalahpahaman yang disebabkan oleh komunikasi yang kurang baik.

Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa untuk melaksanakan kebijakan dapat diimplementasikan dengan baik sesuai rencana, dibutuhkan komunikasi yang tertata serta terkoordinir agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan di kemudian hari.

e) Konsisi Sosial, Ekonomi, dan Politik

Dalam melaksanakan implementasi kebijakan diharapkan untuk melihat kondisi sosial, ekonomi, dan politik di suatu daerah agar saat kebijakan ini di implementasikan bisa berjalan dengan baik. Hal ini dilakukan karena setiap daerah memiliki keadaan yang berbeda, sehingga kebijakan yang dibuat harus disesuaikan dengan kondisi masyarakatnya agar kebijakan tersebut bisa diterima dengan baik oleh masyarakat.

Proses awal dari adanya kebijakan bantuan laptop gratis yang diberikan untuk pelajar di Kota Madiun ini merupakan sebuah janji politik yang diberikan oleh Drs. H. Maudi, S.H., M.M., MPd. saat mencalonkan diri menjadi walikota. Kemudian saat beliau terpilih, maka dibuatlah rencana pembangunan Kota Madiun melalui Perda Nomor 17 tahun 2019 tentang RPJMD Kota Madiun. Bersamaan dengan adanya peraturan tersebut, di tahun yang sama pula yaitu di tahun 2019 dimulailah untuk mengadakan riset mengenai kebijakan ini serta merencanakan anggaran untuk bantuan laptop.

Tujuan diadakan bantuan tersebut yaitu untuk mendukung kegiatan digitalisasi pada pendidikan, tetapi disini pemerintah menyadari akan kondisi ekonomi dan sosial yang berbeda beda sehingga akan sulit untuk melakukan digitalisasi. Seperti halnya para siswa yang bersekolah di SDN 03,04 dan 05 Kota Madiun ini memiliki latar belakang kehidupan yang tidak sama. Maka dari itu dibuatkan kebijakan bantuan laptop gratis kepada seluruh siswa SD dan SMP Negeri di Kota Madiun tanpa memandang status sosial. Dengan adanya bantuan ini diharapkan bisa mengatasi tidak merata kondisi sosial ekonomi yang ada di Kota Madiun serta kegiatan digitalisasi tersebut bisa dijalankan dengan baik.

Kebijakan bantuan laptop gratis ini menerima respon yang baik dari orang tua peserta didik; peserta didik; serta para pendidik yang ada di lingkungan Kota

Madiun seperti yang diungkap Ibu Kartini, selaku orang tua peserta didik mengatakan bahwa:

“Semenjak adanya bantuan ini jelas memudahkan anak saya untuk belajar, karena jika tidak ada bantuan ini mungkin saya bingung soalnya saya hidup pas pas-an”

(Wawancara tanggal 27 Maret 2023)

Bantuan laptop yang telah didistribusikan oleh pemerintah Kota Madiun sejak tahun 2020 hingga tahun 2023 memiliki total 14.825 unit laptop dengan rincian di tahun 2020 dibagikan sebanyak 5.425 ribu unit laptop, sedangkan di tahun 2023 dibagikan sebanyak 9.400 unit laptop. Dengan dibagikan laptop kepada peserta didik juga memberikan dampak positif, hal ini disampaikan oleh Ibu Dr. Hj. Lismawati, M.Pd., selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun bahwa:

“Adanya kebijakan tersebut menjadi meningkatkan nilai raport pendidikan bagi Kota Madiun. Raport tersebut isinya tentang literasi, numerasi, dan survei karakter anak. Alhamdulillahnya disini hasilnya meningkat dari tahun tahun sebelumnya dan nilainya disini diatas rata rata nasional dan provinsi.”

(Wawancara tanggal 21 Maret 2023)

Pernyataan tersebut memberikan kepuasan tersendiri bagi pemerintah, dimana peningkatan rapor pendidikan tersebut dapat membuat kondisi sosial di masyarakat menjadi meningkat. Dalam artian apabila nilai raport meningkat maka kualitas individu juga dapat dikatakan meningkat.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa adanya implementasi kebijakan bantuan laptop gratis untuk siswa SD dan SMP Negeri di Kota Madiun dari kondisi sosial, ekonomi dan politik ini berjalan dengan lancar. Implementasi ini bisa berjalan dengan baik di Kota Madiun karena adanya respon positif dari masyarakat serta memiliki lingkungan yang mendukung kebijakan tersebut seperti pemberian fasilitas di Kota Madiun yang mendukung. Maka dari itu tidak heran jika kebijakan ini bisa berjalan dengan baik di Kota Madiun.

f) Disposisi Implementasi/Pelaksana

Keblerlangsungan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh adanya faktor yang berasal dari sikap dari para implementor. Sikap implementor yang

dimaksud disini yaitu adalah cara bagaimana para implementor memandang kebijakan yang telah dibuat serta melihat pelaksanaannya; aturan yang dibuat untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Apakah para implementor ini bisa menerima serta melaksanakan kebijakan tersebut dengan sesuai atau para implementor tersebut memiliki pandangan yang berbeda dalam melakukan implementasi tersebut.

Berkenaan dengan itu maka staff yang ada di lingkup Dinas Pendidikan harus memiliki pemahaman yang baik mengingat disini Dinas Pendidikan memiliki wewenang penuh terhadap implementasi kebijakan bantuan laptop gratis untuk siswa SD dan SMP Negeri. Jika staff dari dinas memahami dengan baik maka saat memberikan arahan kepada pihak sekolah mengenai kebijakan bantuan laptop ini akan berjalan dengan lancar.

Disisi lain, dari sisi kepala sekolah maupun guru juga terlihat bersikap patuh terhadap arahan serta tugas yang diberikan di SDN 03, 04, dan 05 Madiun Lor ini semuanya melaksanakan perintah dengan baik tanpa ada yang menolak maupun berjalan sendiri tanpa ada utusan dari dinas.

Berdasarkan hal tersebut peneliti melihat bahwa secara keseluruhan baik staff Dinas Pendidikan Kota Madiun maupun dari pihak sekolah (guru; kepala sekolah; orang tua peserta didik; dan peserta didik) memiliki pemahaman yang baik terhadap kebijakan tersebut. Dimana disini dari pihak staff dinas; kepala sekolah serta guru mengerti mengenai kebijakan tersebut serta bersikap patuh terhadap kebijakan, serta melakukan tugasnya sesuai dengan petunjuk dari kepala Dinas Pendidikan yang dibuat oleh pihak dinas. Sedangkan pihak orang tua dan peserta didik bersikap mau menerima perjanjian yang telah dibuat antara orang tua peserta didik dan pihak sekolah mengenai kebijakan tersebut. Dari adanya kepatuhan yang dilakukan oleh berbagai pihak tersebut membuat implementasi kebijakan bantuan laptop ini dapat berjalan dengan lancar.

KESIMPULAN

Bersumber pada hasil penelitian yang dilakukan mengenai Implementasi Kebijakan Bantuan Laptop Gratis Untuk Meningkatkan Pembelajaran Digital Tingkat Sekolah Dasar Negeri di Kelurahan Madiun Lor Kota Madiun ini dapat dikatakan cukup baik. Hal tersebut dapat terlihat dari adanya 5 indikator yang terpenuhi sesuai model implementasi dari Van Meter dan Van Horn, ialah:

a) Standar dan tujuan kebijakan

Kebijakan ini ditujukan kepada pelajar di Kota Madiun di jenjang SD Negeri kelas 4,5 dan 6 secara gratis sesuai dengan standar regulasi yang ada yaitu Perwali No 33 Tahun 2020. Tujuan dari dibuatnya bantuan ini adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Kota Madiun sesuai dengan RPJMD tahun 2019. Bantuan ini diberikan agar dapat melakukan inovasi berupa digitalisasi di bidang pendidikan sejak dini untuk melatih siswa agar menjadi lebih menguasai teknologi.

b) Sumber daya

Pada poin ini dibagi menjadi 3. Untuk dari segi keuangan memiliki kondisi yang baik serta terukur, hal ini dibuktikan dengan adanya 14.825 laptop yang dibeli menggunakan APBD yang menelan biaya sekitar 57 miliar di tahun 2023. Sedangkan pada sumber daya manusia dan sarana prasarana masih ditemukan kendala berupa kurangnya SDM yang mumpuni dalam teknologi; masih ditemukan laporan mengenai kerusakan laptop yang diakibatkan pemakaian pribadi maupun sistem; penggunaan laptop yang kurang terkontrol; serta koneksi internet yang kurang stabil.

c) Karakteristik lembaga pelaksana

Dinas pendidikan sebagai koordinator dan penanggung jawab bantuan ini menggandeng beberapa pihak berdasarkan kemampuan dan *skill* yang dimiliki oleh berbagai lembaga. Dalam mewujudkan kebijakan ini dibutuhkan kerjasama dengan Universitas Negeri Surabaya (UNESA); Politeknik Negeri Madiun (PNM); PT. Acer Indonesia; PT. Refo Indonesia; Seluruh sekolah SD Negeri di Kota Madiun; Orang Tua; dan Peserta Didik.

d) Aktivitas komunikasi

Dalam melaksanakan implementasi kebijakan ini adalah dengan melakukan koordinasi secara terus menerus kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Koordinasi ini dilakukan agar selama melaksanakan kebijakan tersebut tidak terjadi salah paham dan semua pihak dapat memahami dengan jelas mengenai kebijakan tersebut, jika semua pihak mengerti dan memahami kebijakan tersebut maka dalam proses implementasinya akan menjadi lebih mudah.

e) Kondisi sosial, ekonomi, dan politik

Kebijakan ini bermula karena adanya janji politik untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Madiun, peningkatan tersebut dilakukan cara literasi digital tetapi karena adanya perbedaan status sosial dan ekonomi dapat mengakibatkan kebijakan tersebut tidak dapat berjalan. Maka dari itu diberikan laptop gratis guna menunjang kebijakan. Pada aspek ini tidak ditemukan hambatan karena bantuan ini mendapatkan respon yang positif dari orang tua maupun peserta didik untuk mau menjaga serta merawat laptop yang diberikan.

f) Disposisi implementor/pelaksana

Pada indikator ini memiliki sikap yang patuh terhadap atasan. Dimana dari pihak sekolah serta staff yang ada di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Madiun menjalankan tugasnya dengan baik sesuai arahan dari kepala Dinas Pendidikan, oleh karena itu sikap dari para pelaksana dalam implementasi bantuan laptop gratis ini mendukung terhadap kelancaran implementasi kebijakan.

SARAN

Dari permasalahan diatas maka peneliti ingin memberikan beberapa saran yang dapat disampaikan:

1. Melakukan pengawasan dan *maintenance* secara rutin mengenai laptop agar meminimalisir kerusakan pada laptop.
2. Melakukan pengawasan dirumah maupun sekolah kepada peserta didik untuk memastikan bahwa laptop tersebut digunakan untuk kegiatan pembelajaran
3. Menambah *bandwidth* atau kuota internet agar jaringan *wifi* bisa stabil.
4. Melakukan kegiatan pelatihan kepada guru maupun *staff* Dinas dalam penggunaan laptop agar memiliki sumber daya manusia yang mahir dalam menggunakan laptop.

DAFTAR PUSTAKA

Andri Jaya. 2022. Pengaruh Sarana Dan Prasarana Terhadap Pengembangan Mutu Pendidikan Sekolah Islam Al-Fadiyah Sungguminasa (Studi Pada Sekolah Islam Al-Fadiyah Sungguminasa). Skripsi tidak diterbitkan. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar

Eprilianto, Deby Febriyan, dkk. 2019. Mewujudkan Integrasi Data Melalui Implementasi Pelayanan Kesehatan Berbasis Teknologi Digital. *Journal of*

Public Sector Innovations, 4(11). 30-37.
<https://doi.org/10.26740/jpsi.v4n1.p30-37>

Hardani, dkk. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.

Kasmad Rulinawati. 2013. *Studi Implementasi Kebijakan Publik*. Makassar: Kedai Aksara

Luthfi, Restiyani P, & Richi R. 2021. Implementasi Literasi Digital dalam Upaya Memperkuat Pendidikan Karakter Siswa. *Buletin Pengembangan Perangkat Pembelajaran*. 3(2). 87-92. <https://doi.org/10.23917/bppp.v4i2.19420>

Melisa Dwi & Megawati. S. 2023. Implementasi Model Pembelajaran Hybrid Pada Pembelajaran Tatap Muka Terbatas di SMA Negeri 13 Surabaya. *Jurnal Publika*. 11 (1). 1629-1642. <https://doi.org/10.26740/publika.v11n1.p1629-1642>

Munir. 2017. *Pembelajaran Digital*. Bandung: Alfabeta

Pahleviannur, Muhammad Rizal, dkk. 2022. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukoharjo: Pradina Pustaka

Peraturan Daerah No 17 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun

Peraturan Walikota Madiun Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Laptop Untuk Dioperasikan Oleh Siswa Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Madiun

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah